

KLIPING BERITA MEDIA MASSA

Rabu, 29 April 2020



BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

KATA PENGANTAR

Klipping Media Massa adalah kumpulan guntingan berita yang kami sajikan secara rutin. Guntingan berita ini kami seleksi dari berita yang muncul di media cetak. Adapun tema berita yang kami pilih adalah berita yang berkaitan dengan organisasi dan substansi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan yang berkaitan dengannya.

Kami berharap klipping ini bermanfaat untuk monitoring media BPIW.

Hormat kami

Tim penyusun

DAFTAR ISI

No	Media	Tanggal	News Title	Resume
1	Bisnis Indonesia, Halaman 6	Rabu, 29 April 2020	ATI Prediksi Kinerja Bisnis Kuartal II Bakal Tergerus	Asosiasi Jalan Tol Indonesia memprediksi kinerja bisnis jalan tol tergerus pada kuartal II/2020 sebagai imbas sejumlah kebijakan untuk mencegah penyebaran virus corona.
2	Koran Tempo, Halaman Ekonomi & Bisnis 1	Rabu, 29 April 2020	Masa Pengerjaan Proyek Infrastruktur Diperpanjang	Kementerian PUPR menghemat anggaran sebesar Rp 44,5 triliun dari hasil penyisiran alokasi kegiatan tahun anggaran 2020.
3	Medcom.id	Selasa, 28 April 2020	Kementerian PUPR Batasi Jumlah Kendaraan di Rest Area	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menerbitkan aturan untuk pembatasan jarak sosial dan fisik di 25 tempat istirahat dan pelayanan (TIP) atau rest area di jalan tol. Aturan tertuang dalam Surat Edaran Menteri PUPR 07/SE/M/2020. https://www.medcom.id/nasional/politik/ybDI4oAb-kementerian-pupr-batasi-jumlah-kendaraan-di-rest-area
4	Investor.id	Selasa, 28 April 2020	Asosiasi Tol Surati PUPR Terkait Stimulus Jalan Tol	Hari ini, Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI) mengirimkan surat kepada Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), terkait rencana stimulus dan inisiatif bagi Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) akibat dampak pandemi virus corona (Covid-19). https://investor.id/business/asosiasi-tol-surati-pupr-terkait-stimulus-jalan-tol
5	Tempo.co	Selasa, 28 April 2020	PON 2020 Diundur, PUPR Perpanjang Masa Pengerjaan Venue	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan melakukan perpanjangan masa pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan venues PON 2020 Papua hingga awal 2021, khususnya untuk venues dayung, panahan, sepatu roda, 5 tower rumah susun, serta penataan kawasan kompleks olahraga Kampung Harapan dan Doyo Baru. https://sport.tempo.co/read/1336474/pon-2020-diundur-pupr-perpanjang-masa-pengerjaan-venue/full&view=ok
6	Goriatu.com	Selasa, 28 April 2020	Anggaran Pemindahan Ibukota Baru Dialihkan ke Penanggungan Covid-19, PKS Apresiasi Kemenkeu	Anggaran penyiapan proyek infrastruktur Ibukota baru di Kementerian PUPR, dialihkan untuk penanggulangan pandemi virus corona atau covid-19. https://www.goriatu.com/berita/baca/anggaran-pemindahan-ibukota-baru-dialihkan-ke-penanggungan-covid19-pks-apresiasi-kemenkeu.html
7	Kompas.com	Selasa, 28 April 2020	Lalu Lintas di 14 Jalan Tol Anjlok Usai PSBB dan Larangan Mudik	Sejak Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diterapkan guna mencegah penularan virus corona (Covid-19), tercatat pergerakan mobilitas di sejumlah jalan tol mengalami penurunan yang sangat drastis. https://otomotif.kompas.com/read/2020/04/28/113051115/lalu-lintas-di-14-jalan-tol-anjlok-usai-psbb-dan-larangan-mudik
8	Antaranews.com	Rabu, 29 April 2020	PUPR: Trafik jalan nasional Pulau Jawa turun 68 persen selama PSBB	Kementerian PUPR mengungkapkan terjadi penurunan arus lalu lintas atau trafik jalan nasional rata-rata 68 persen selama Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB di Pulau Jawa. https://www.antaranews.com/berita/1450308/pupr-trafik-jalan-nasional-pulau-jawa-turun-68-persen-selama-psbb
9	Antaranews.com	Rabu, 29 April 2020	PUPR: Trafik jalan nasional Riau dan Sulsel turun drastis selama PSBB	Kementerian PUPR mencatat penurunan lalu lintas harian atau trafik jalan nasional di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Riau secara drastis selama pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB

				https://www.antaranews.com/berita/1450332/pupr-trafik-jalan-nasional-riau-dan-sulsel-turun-drastis-selama-psbb
10	Antaranews.com	Selasa, 28 April 2020	Pemerintah bantu nelayan miliki rumah layak huni	Kementerian PUPR membantu agar nelayan di Kabupaten Pesisir Selatan Carocok Terusan, Provinsi Sumatera barat, dapat memiliki rumah layak huni. https://www.antaranews.com/berita/1448460/pemerintah-bantu-nelayan-miliki-rumah-layak-huni
11	Okezone.com	Selasa, 28 April 2020	Mudik Dilarang, Traffic Penguna Tol di Cikarang Utama ke Semarang Turun	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memonitor penurunan traffic pengguna jalan tol di ruas-ruas wilayah. Hal ini seiring diberlakukannya pelarangan mudik Lebaran tahun ini. https://economy.okezone.com/read/2020/04/28/320/2205983/mudik-dilarang-traffic-penguna-tol-di-cikarang-utama-ke-semarang-turun
12	Timeisindonesia.co.id	Selasa, 28 April 2020	Kementerian PUPR RI Bedah Ribuan Rumah Tak Layak Huni di Sulbar	Untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan menekan penyebaran COVID-19, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR RI) terus berupaya untuk mengurangi jumlah rumah tak layak huni (RTLH) di Indonesia melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau dikenal dengan bedah rumah. https://www.timesindonesia.co.id/read/news/268159/kementerian-pupr-ri-bedah-ribuan-rumah-tak-layak-huni-di-sulbar

Judul	ATI Prediksi Kinerja Bisnis Kuartal II Bakal Tergerus	Tanggal	Rabu, 29 April 2020
Media	Bisnis Indonesia, Halaman 6		
Resume	Asosiasi Jalan Tol Indonesia memprediksi kinerja bisnis jalan tol tergerus pada kuartal II/2020 sebagai imbas sejumlah kebijakan untuk mencegah penyebaran virus corona.		

| LALU LINTAS PENGGUNA JALAN TOL |

ATI Prediksi Kinerja Bisnis Kuartal II Bakal Tergerus

Bisnis, JAKARTA — Asosiasi Jalan Tol Indonesia memprediksi kinerja bisnis jalan tol tergerus pada kuartal II/2020 sebagai imbas sejumlah kebijakan untuk mencegah penyebaran virus corona.

Saat ini, pemerintah telah menetapkan 24 kota dan kabupaten menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) serta melarang aktivitas mudik Lebaran 2020.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI) Krist Ade Sudiyo mengatakan penurunan kinerja bisnis jalan tol akan terlihat pada kuartal II/2020 karena kebijakan bekerja dari rumah yang dilanjutkan PSBB dilakukan pada medio Maret 2020.

“Dengan demikian, harusnya performa sektor jalan tol pada kuartal pertama 2020 yaitu Januari—Maret, masih terjaga sesuai dengan rencana bisnis awal. Dampak Covid-19, baru akan mulai menggerus di performa kuartal kedua 2020 nanti,” katanya kepada *Bisnis*, Senin (27/4).

Saat ini, dia menyatakan asosiasi masih terus memantau dampak pandemi Covid-19 terhadap bisnis jalan tol, terutama setelah pemerintah mengeluarkan kebijakan pelarangan mudik Lebaran 2020 yang dimulai pada 24 April hingga 31 Mei 2020. Namun, Krist Ade menegaskan penerapan kebijakan larangan mudik secara umum mengakibatkan

penurunan lalu lintas harian (LHR) di sebagian ruas tol rata-rata 40%—60% dibandingkan dengan tahun lalu. “Penurunan LHR ini tentunya akan memengaruhi total *revenue* yang bervariasi di setiap badan usaha jalan tol.”

Untuk kinerja bisnis kuartal pertama yaitu Januari—Maret 2020, dia menegaskan secara garis besar masih sesuai dengan rencana kerja yang disusun pada awal tahun.

Di sisi kinerja jalan tol yang sudah beroperasi mengungkapkan bahwa laporan jumlah lalu lintas dan pendapatan tol masih sesuai dengan rencana awal.

Dampak Covid-19, imbuhnya, baru mulai terasa di beberapa ruas di area Metro Jakarta,

tepatnya baru di beberapa pekan terakhir pada Maret 2020.

Khusus beberapa ruas tol yang masih dalam tahap konstruksi menunjukkan progres yang mengembirakan, misalnya, di ruas Manado—Bitung, di tol Trans-Sumatra segmen Pekanbaru—Dumai dan segmen Kayu Agung—Palembang—Betung.

Selanjutnya, ruas Pandaan—Malang, Depok—Antasari, Cimanggis—Cibitung, Balikpapan—Samarinda, Cisumdawu, Legundi—Bunder, serta Sigli—Banda Aceh.

Demikian juga, beberapa proyek inisiasi baru sudah mulai diintroduksi oleh pemerintah, Krist Ade mengungkapkan proyek tersebut seperti ruas

Yogyakarta—Solo, Bawen—Yogyakarta, Bogor—Serpong, Cikunir—Karawaci, dan Kamal—Teluk Naga.

Terkait dengan inisiatif dan stimulus ekonomi bagi jalan tol untuk mengatasi dampak Covid-19, dia menyatakan terus menjalin komunikasi dengan semua pemangku kepentingan.

Sementara itu, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memprediksi LHR rata-rata di jalan tol dapat tersisa hanya 20%—30% saja dari periode normal seiring dengan adanya pembatasan dan larangan mudik.

Kepala BPJT Kementerian PUPR Danang Parikesit mengatakan penurunan trafik jalan

tol selama PSBB di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten berkisar 42% hingga 60%. “Adanya perintah presiden tanggal 21 April dan efektif pelarangan perjalanan antar wilayah PSBB menekan lagi *traffic* hingga tinggal 20%—30%,” ujarnya kepada *Bisnis*, Selasa (28/4).

Untuk LHR di tol Sumatra hingga kini BPJT masih terus melakukan pemantauan karena ada kenaikan *traffic* yang kemungkinan karena arus barang meningkat.

Danang menambahkan terjadi penurunan sekitar 60%—70% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu ketika musim mudik Lebaran.

(Agne Yasa)

Judul	Masa Pengerjaan Proyek Infrastruktur Diperpanjang	Tanggal	Rabu, 29 April 2020
Media	Koran Tempo, Halaman Ekonomi & Bisnis 1		
Resume	Kementerian PUPR menghemat anggaran sebesar Rp 44,5 triliun dari hasil penyesiran alokasi kegiatan tahun anggaran 2020.		

EKONOMI DAN BISNIS

Masa Pengerjaan Proyek Infrastruktur Diperpanjang

Pembangunan bendungan di berbagai wilayah ditargetkan rampung tahun ini.

EDISI, 29 APRIL 2020



Proyek Bendungan Ciawi-Sukamahi & Ciawi, Bogor, Jawa Barat, 2 Maret lalu. ANTARA/Yulius Santia Wijaya

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menghemat anggaran sebesar Rp 44,5 triliun dari hasil penyesiran alokasi kegiatan tahun anggaran 2020. "Realokasi dengan asumsi penanganan Covid-19 selama tiga bulan. Kami berhemat dari proyek yang kontraknya bisa diperpanjang atau ditunda ke tahun depan," kata Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian PUPR Endra Saleh Atmawidjaja kepada Tempo, kemarin.

Dia menjelaskan penghematan yang dilakukan beraneka ragam, dari pemotongan biaya perjalanan dinas dan paket rapat, penundaan kontrak yang belum lelang, hingga pemangkasan anggaran nonfisik seperti survei. Menurut Endra, Kementerian juga menyeleksi dan mengubah sejumlah paket kerja tahun tunggal (single year) menjadi paket tahun jamak khusus kontrak senilai maksimum Rp 100 miliar. Contohnya adalah pelonggaran kerja beberapa proyek pendukung Pekan Olahraga Nasional (PON) 2020 di Papua, seperti venue olahraga, lima tower rumah susun, serta penataan kompleks.

Pemerintah menunda pelaksanaan PON ke tahun depan. Penundaan tersebut membuat Kementerian lebih berfokus kepada penanganan Covid-19. Menurut Endra, jika proyek PON dikebut, dipastikan malah menjadi beban anggaran.

Meski begitu, Endra memastikan Kementerian tetap menyelesaikan program prioritas yang targetnya mengikat dan sudah memasuki tahap akhir konstruksi. Salah satunya adalah pengerjaan Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi di hulu Sungai Ciliwung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kedua bendungan itu diproyeksikan meredam aliran air dari Gunung Gede dan Gunung Pangrango ke arah Sungai Ciliwung, dan memangkas debit banjir ke arah Jakarta. "Pemilihan proyek prioritas biasanya didasari rencana strategis, arahan presiden, dan aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat," kata dia.

Perpanjangan pelaksanaan paket tahun jamak alias multiyear menjadi strategi penghematan. Direktur Jenderal Bina Marga, Hedy Rahadian, mengatakan unitnya harus tetap mengawasi kondisi sistem jaringan jalan nasional di tengah pemangkasan anggaran. "Prinsipnya adalah relaksasi, tapi kami tetap menjaga proyek strategis, misalnya konektivitas kawasan strategis pariwisata nasional," tutur dia.

Baca Juga

by Ooble

- Indonesia Tutup Akses Warga Asing - Laporan Utama
- Proyek Jalan Tol Paling Diminati Investor - Ekonomi dan Bisnis
- Proyek Berisiko Bisa Dihentikan Sementara - Ekonomi dan Bisnis
- Ravio: Kriminalisasi Seperti Ini Sering Terjadi - Cover Story
- Empat Pola Diduga Digunakan untuk Memberangus Pengkritik Pemerintah...
- Jonan Disebut Memberi Paket ke Damayanti - Nasional

Proyek lain yang masa pengerjaannya diperpanjang adalah pembangunan Bendungan Way Sekampung di Lampung, Bendungan Jragung di Jawa Tengah, dan Bendungan Temef di Nusa Tenggara Timur. Ada juga pelonggaran tenggat pembangunan Jalan Lingkar Timur Kuningan di Jawa Barat, serta pembangunan Jalan Lingkar Brebes-Tegal di Jawa Tengah.

Bukan hanya Kementerian PU yang diwajibkan merealokasi anggaran demi penanganan pandemi. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) membuat berbagai kementerian memangkas banyak pos biaya, semisal keperluan rapat tatap muka, perjalanan dinas luar kota, serta biaya lain yang bersifat tidak tetap.

Kementerian Perindustrian berencana merealokasi Rp 75,77 miliar dari pagu anggaran 2020 untuk kepentingan penanganan pandemi. Kementerian merealokasi anggaran sebesar Rp 1,2 triliun dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran APBN 2020.

Sekretaris Perusahaan PT Wijaya Karya (persero) Tbk, Mahendra Wijaya, mengatakan belum menerima kabar ihwal penundaan pada proyek yang ditangani entitasnya. "Kami belum menerima list proyek yang pending, jadi kebanyakan kegiatan WIKA berjalan," kata dia. **IRSYAN HASYIM | YOHANES PASKALIS PAE DAE**

Memangkas Anggaran Proyek

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memangkas anggaran kegiatan 2020 untuk dialihkan pada penanganan pandemi Covid-19. Kementerian melakukan penghematan mulai dengan penundaan pekerjaan minor sampai tahun depan hingga memperpanjang proyek yang seharusnya selesai pada tahun ini.

Perubahan Komposisi Anggaran (Rp triliun)

Pagu awal 2020: **Rp 120,2 triliun**
Pagu setelah penghematan dan penyesuaian belanja: **Rp 75,63 triliun**
Hasil penghematan untuk penanganan Covid-19: **Rp 44,58 triliun**

Pos Penghematan Terbesar (Rp triliun)

Nilai Total:	44,58
• Ditjen Bina Marga :	17,35
• Ditjen Sumber Daya Air :	16,54
• Ditjen Cipta Karya :	8,56
• Ditjen Perumahan :	1,79
• direktorat lain-lain :	0,34

Realokasi Anggaran

- Penghematan biaya perjalanan dinas dan paket *meeting*.
- Penundaan paket kontraktual yang belum dilelang.
- Perpanjangan pelaksanaan paket kegiatan tahun jamak (*multiyear*).
- Seleksi dan pengubahan paket kerja tahun tunggal (*single year*) menjadi paket tahun jamak, termasuk paket kontraktual senilai maksimum Rp 100 miliar.
- Pemangkasan anggaran kegiatan non-fisik yang bisa ditunda, seperti survei dan penyusunan desain.

SUMBER: WAWANCARA, KEMENTERIAN PUPR | YOHANES PASKALIS